

## **Analisis Pencapaian Target Nasional pada Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Tidore Kepulauan**

Wiwik Roso Sri Rejeki<sup>1\*</sup>, Imelda Hutasoit<sup>2</sup>, Indramayu<sup>3</sup>  
[wiwikroso@ipdn.ac.id](mailto:wiwikroso@ipdn.ac.id), Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1\*</sup>  
[imeldahutasoit@ipdn.ac.id](mailto:imeldahutasoit@ipdn.ac.id), Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>2</sup>  
[indram@ipdn.ac.id](mailto:indram@ipdn.ac.id), Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>3</sup>

Received: 30-06-2025, Accepted: 17-09-2025; Published Online: 07-11-2025

\*Corresponding Author

### **ABSTRAK**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menetapkan target capaian kinerja tahun 2024 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024. Kota Tidore Kepulauan, capaian kinerja masih rendah pada perekaman KTP-el (92,24%), kepemilikan KIA (33,32%), dan penerapan IKD (8,9%). Hal tersebut menunjukkan perlunya strategi percepatan untuk memenuhi target nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan capaian target nasional dengan menggunakan analisis SWOT. Fokus penelitian diarahkan pada kendala dan upaya peningkatan kinerja Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dengan merujuk periode capaian tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian belum optimal akibat faktor geografis, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, anggaran, dan ketersediaan blanko KTP-el. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan sosialisasi melalui media sosial, peningkatan kerja sama lintas instansi, serta pengembangan pelayanan berbasis teknologi. Implikasi penelitian menegaskan bahwa keberhasilan capaian target nasional administrasi kependudukan membutuhkan inovasi komunikasi, dukungan kebijakan, dan sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Target Kinerja, Analisa SWOT, Dokumen Kependudukan.

### **ABSTRACT**

*The Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs has set the 2024 performance achievement targets for the Population and Civil Registration Offices of districts and cities as stipulated in the Minister of Home Affairs Decree Number 100.4.6-635 Dukcapil 2024. In Tidore Islands City, performance achievements remain low in several indicators, such as for Identity Card reached 90%, for Child Identity Card reached 33.32%, and for Digital Identity reached 8.9%. This condition indicates the need for acceleration strategies to meet national targets. This study aims to analyze the strategies of the Disdukcapil of Tidore Islands City in improving the achievement of national targets using SWOT analysis. The research focuses on identifying the constraints and efforts to enhance the performance of the Disdukcapil of Tidore Islands City based on the 2024 performance period. The method*

*employed is descriptive qualitative, with purposive sampling and snowball sampling techniques. The results show that the achievements have not been optimal due to geographical factors, limited telecommunication infrastructure, budget constraints, and the availability of KTP-el blanks. The recommendations include strengthening socialization through social media, enhancing inter-agency cooperation, and developing technology-based services. The implications of the study emphasize that the success of achieving national targets in population administration requires communication innovation, policy support, and continuous synergy among stakeholders.*

**Keywords:** *Performance Target, SWOT Analysis, Population Documents*

## **PENDAHULUAN**

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi. Fungsi ini menjadi bagian penting dari tata pemerintahan karena menyediakan data akurat dan mutakhir yang mendukung pelayanan publik, perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, penyelenggaraan administrasi kependudukan wajib dilakukan secara tertib dan nondiskriminatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional dan efektif memastikan keabsahan identitas, kepastian hukum atas dokumen, serta perlindungan hak-hak sipil penduduk. Administrasi kependudukan juga berfungsi untuk menyediakan data nasional yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses untuk mendukung pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Namun, menunjukkan masih terdapat permasalahan, terutama di wilayah pedesaan, misalnya kurangnya pembaruan data yang menimbulkan ketidaksesuaian antara catatan kependudukan dan kondisi faktual. Ketidakesuaian ini berdampak pada efektivitas kebijakan pemerintah berbasis data, seperti data pemilu, bantuan sosial, dan program pembangunan lainnya (Murwani o.fl., 2024).

Data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghasilkan data agregat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut bermanfaat bagi pemerintah maupun swasta untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokrasi, hingga penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data telah berjalan efektif, karena pengguna dapat mengakses informasi secara baik (Hasri & Rahmah, 2022). Dengan demikian, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan,

pelayanan yang setara, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, akses terhadap informasi, serta ganti rugi dan pemulihan nama baik akibat kesalahan atau penyalahgunaan data, sebagaimana dijamin dalam UU Adminduk.

Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menetapkan target capaian kinerja bagi Disdukcapil Kabupaten/Kota terkait kepemilikan beberapa dokumen kependudukan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6 - 635 Dukcapil Tahun 2024. Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan per 1 Maret 2025 menunjukkan belum mencapai target kinerja sebagaimana data berikut ini:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan

No	Kinerja	Target Nasional	Capaian (orang)	Capaian (%)
1.	Perekaman KTP-el	99,40%	82.413	92,24%
2.	Kepemilikan KIA	60,00%	10.844	33,32%
3.	Penerapan IKD	30,00%	7.968	8,90%

(Sumber: Aplikasi PDAK Dukcapil Kemendagri tanggal 1 Maret 2025).

Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan belum memenuhi target dan perlu upaya peningkatan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pertama, Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) hanya mencapai 92,24% dari target nasional 99,40%, sehingga diperlukan sebanyak 7,76% lagi untuk mencapai target nasional. Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Tidore Kepulauan berpotensi kehilangan hak atas pelayanan publik lainnya. Kedua, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga belum memenuhi target nasional, yaitu hanya mencapai 33,32% dari target 60,00%, artinya Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan memerlukan sebanyak 26,68% lagi untuk mencapai target nasional. Anak-anak yang belum memiliki KIA dipastikan tidak dapat merasakan manfaat dari KIA tersebut. Ketiga, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga belum sesuai dengan harapan, dari target nasional sebanyak 30%, hanya 8,90% masyarakat yang sudah melakukan aktivasi IKD, artinya diperlukan tambahan sebanyak 21,10% untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

Rendahnya angka capaian kinerja Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan tidak terlepas dari pengaruh aksesibilitas ke Kota Tidore Kepulauan yang memiliki luas 1.550,37 km<sup>2</sup>. Kota Tidore Kepulauan merupakan kota terluas ketiga di Indonesia yang terdiri dari satu pulau utama yaitu Pulau Tidore dan 16 pulau kecil lainnya. Untuk jalur transportasi laut di Kota Tidore Kepulauan mudah didapatkan karena moda transportasi yang cukup bervariasi yaitu

kapal fery, dan kapal motor *speedboat* yang jumlahnya cukup banyak. Dengan kondisi geografis yang banyak pulau-pulau menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Jarak domisili ke tempat pelayanan yang jauh dan sulit dijangkau dapat menghambat perkembangan pengurusan administrasi kependudukan (Anita, 2021). Aksesibilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi tantangan bagi Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Urgensi penelitian mengenai strategi pencapaian target nasional di bidang administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan sangat penting untuk dilakukan. Rendahnya capaian kinerja pada indikator utama seperti perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, dan aktivasi IKD menunjukkan perlunya strategi yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan sarana pelayanan. Tanpa adanya upaya terencana, masyarakat berisiko kehilangan hak-hak sipilnya dan pemerintah kesulitan memperoleh data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta merumuskan strategi dalam meningkatkan pencapaian target nasional administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan inovasi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan dan relevansinya dengan pemenuhan hak-hak sipil penduduk.

Metode analisis SWOT dipandang tepat karena mampu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kinerja Disdukcapil. Pendekatan ini relevan untuk menjawab research gap berupa rendahnya capaian target akibat kendala geografis dan keterbatasan sarana pelayanan. Dengan analisis SWOT, diharapkan lahir strategi yang realistis, aplikatif, dan terukur guna meningkatkan kinerja administrasi kependudukan serta mendukung pencapaian target nasional secara optimal.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Administrasi Kependudukan**

Secara yuridis, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas, perlindungan hak-hak sipil, serta ketersediaan data penduduk yang akurat dan mutakhir sebagai dasar kebijakan pembangunan

nasional (Republik Indonesia, 2013). Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, oleh karena itu administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Adminduk). Pelayanan publik merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses yang adil dan efisien terhadap berbagai layanan, baik itu dalam bentuk informasi, fasilitas, atau bantuan. Pelayanan publik mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, dan lainnya. Pelayanan publik yang baik diharapkan memenuhi standar kualitas tertentu, termasuk kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat merasa puas dan mendapatkan manfaat secara optimal.

## 3. Strategi SWOT

Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an hingga 1970-an melalui riset di Stanford Research Institute. SWOT digunakan untuk merumuskan strategi organisasi dengan cara mengidentifikasi faktor internal berupa *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), serta faktor eksternal berupa *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman). Melalui pemetaan ini, organisasi dapat

menyesuaikan kemampuan internal dengan kondisi lingkungan eksternal sehingga strategi yang dihasilkan lebih efektif (Chermack & Kasshanna, 2007).

Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah instrumen yang sederhana namun komprehensif untuk menggambarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. SWOT membantu memaksimalkan kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancaman (Rangkuti, 2018). Kerangka analisis ini tidak hanya relevan bagi sektor bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat dalam sektor publik, termasuk administrasi kependudukan, karena memberikan landasan sistematis dalam merumuskan strategi pelayanan publik yang efektif.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden atau sumber data lainnya yang terkait dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan capaian target nasional di bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2025 di Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif sebagaimana dikemukakan Creswell yang terdiri atas wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi dan sumber-sumber tambahan. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan menurut Creswell yaitu mengatur dan menyiapkan data, membaca keseluruhan data secara menyeluruh, mengelompokkan data, identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, mengembangkan interpretasi berdasarkan pola dan temuan, menganalisis data lebih lanjut menggunakan kerangka analitis, dan menyajikan representasi data serta menyimpulkan hasil penelitian. (Creswell & Creswell, 2023).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, menggunakan panduan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan pada penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penulis menetapkan para pihak sumber informasi yang dianggap memahami situasi kondisi lapangan, dan memiliki peran penting serta keterkaitan atas penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan mengenai gambaran pelayanan administrasi kependudukan khususnya yang menjadi target nasional yaitu perekaman KTP-el, penerbitan KIA, dan aktivasi IKD. Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Status Informan	Alasan Pemilihan Informan	Data yang diharapkan
1	Kepala Disdukcapil	Sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan	kebijakan strategis, arah kebijakan daerah, perencanaan program, anggaran, dan koordinasi lintas sektor.
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	memiliki kewenangan terkait perekaman KTP-el, penerbitan KK, dan dokumen pendaftaran penduduk lainnya	Capaian, kendala, anggaran dan program-program pendaftaran penduduk.
3	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	memiliki kewenangan dalam penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta dokumen catatan sipil lainnya.	Capaian, kendala, anggaran dan program-program pencatatan sipil.
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	memiliki kewenangan dalam manajemen data kependudukan serta integrasi dengan sistem nasional Ditjen Dukcapil.	kondisi sistem informasi kependudukan, integrasi database, dan kendala infrastruktur teknologi.
5	Administrator Database (ADB).	bertugas menjaga keamanan, konsistensi, dan keterbaruan data kependudukan serta mendukung aspek teknis pengelolaan sistem informasi.	aspek teknis pengelolaan dan pemeliharaan database kependudukan, serta keamanan dan kerahasiaan data.

Analisis kualitatif di atas diperdalam dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi. Kronologi penerapannya meliputi: (a) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, (b) mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, (c) menyusun matriks SWOT, dan (d) merumuskan strategi yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian target nasional administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Untuk Capaian Target Nasional Bidang Kependudukan oleh Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan

Kualitas layanan dalam administrasi kependudukan dikatakan baik jika relevan dengan harapan serta kebutuhan masyarakat (Batubara & Rohmadin, 2023). Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan telah berupaya melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan capaian target nasional bidang administrasi kependudukan, khususnya pada indikator perekaman KTP-el, penerbitan KIA, dan aktivasi IKD. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik melalui inovasi digital maupun pelayanan jemput bola agar pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pertama, Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan telah melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa-desa menggunakan mobil layanan keliling yang diberi nama “Si Jola”. Kehadiran “Si Jola” diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Disdukcapil, sekaligus mempermudah perekaman data bagi penduduk usia produktif dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Selain itu, Disdukcapil juga mengembangkan inovasi digital melalui Aplikasi DAGA (Dokumen Administrasi Kependudukan Dalam Genggaman Anda) yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring, sehingga dapat menekan hambatan geografis dan efisiensi waktu pelayanan.

Kedua, Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SLTP untuk mempercepat penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak). Strategi tersebut dinilai efektif karena mendekatkan pelayanan langsung kepada anak-anak sebagai sasaran utama KIA, sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya dokumen kependudukan bagi anak. Selain itu, Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan juga menerapkan pelayanan terintegrasi, yaitu bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran anak usia di bawah 17 tahun akan langsung diberikan KIA, sehingga mengurangi duplikasi prosedur pelayanan dan mempercepat pencapaian target kepemilikan KIA.

Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala, antara lain: (1) kondisi geografis Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 17 pulau, sehingga akses pelayanan ke seluruh wilayah menjadi sulit; (2) keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, yang menghambat optimalisasi layanan digital termasuk aplikasi DAGA; (3) keterbatasan anggaran daerah, yang membatasi ruang gerak inovasi dan pengadaan sarana prasarana; serta (4) keterbatasan blangko KTP-el yang secara langsung memengaruhi kecepatan penerbitan dokumen kependudukan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun strategi jemput bola dan inovasi digital telah



dilakukan, masih diperlukan perencanaan strategis yang lebih adaptif untuk menjawab tantangan lokal.

Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan telah berusaha maksimal melalui inovasi pelayanan jemput bola dan pemanfaatan teknologi digital. Akan tetapi, keterbatasan geografis, anggaran, infrastruktur, serta sumber daya tetap menjadi hambatan utama dalam pencapaian target nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis strategi yang lebih komprehensif, termasuk pemanfaatan kekuatan internal, peluang eksternal, serta mitigasi kelemahan dan ancaman melalui pendekatan analisis SWOT.

## **2. Strategi Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan**

Analisis terhadap strategi yang dilakukan Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam pencapaian target nasional bidang administrasi kependudukan menggunakan teknik analisis SWOT. Segala faktor diidentifikasi dengan teliti dan efektif. Analisis SWOT merupakan metode paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik dari permasalahan empat sisi yang berbeda (Wahkyudin, 2009). Analisis SWOT dilakukan terhadap dua lingkungan organisasi yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam menganalisa lingkungan internal tentunya akan fokus kepada segala aspek yang berhubungan dengan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada pada organisasi tersebut. Sedangkan dalam menganalisa lingkungan eksternal, organisasi harus mengidentifikasi semua peluang (*opportunities*) yang sedang berkembang pada saat itu dan memperhatikan berbagai ancaman (*threats*) yang mungkin akan timbul dari lingkungan di sekitar organisasi tersebut. Hasil dari analisis SWOT nantinya berupa arahan dan rekomendasi dalam mempertahankan kekuatan dengan memperoleh keuntungan dari peluang yang ada, dengan tetap mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman (Wahkyudin, 2009).

Adapun pendekatan dalam analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

### **a. Kekuatan (*strengths*)**

Kekuatan dapat dimaknai sebagai kemampuan internal yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai tujuannya (Adiwilaga et al., 2023). Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem yang terus berkembang.

Dirjen Dukcapil Kota Tidore Kepulauan berusaha untuk mengembangkan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimulai versi 1 tahun 2005, dan terus dikembangkan mengikuti kemajuan teknologi, sehingga memungkinkan adanya sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan data kependudukan.

2) Regulasi yang jelas.

Dari aspek yuridis, hasil penelusuran dokumentasi menunjukkan adanya regulasi yang lengkap yang mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan terkait. Peraturan-peraturan tersebut diterbitkan menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif, mudah, dan cepat.

3) Keamanan data.

Pengelolaan data kependudukan sangat sensitif menimbulkan risiko terkait keamanan dan penyalahgunaan data pribadi, yang dapat mengancam kepercayaan masyarakat, dan sebagai bukti komitmen terhadap keamanan data tersebut. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan telah berhasil meraih Sertifikat ISO 27001 pada April 2025. Sertifikasi tersebut menjadikan Disdukcapil Tidore Kepulauan satu-satunya di Provinsi Maluku Utara yang memenuhi standar internasional dalam sistem manajemen keamanan informasi, dan memastikan perlindungan data kependudukan yang lebih baik.

4) Basis data yang lengkap dan terintegrasi.

Sistem SIAK yang ada dapat memungkinkan pengumpulan data kependudukan yang akurat, dan digunakan untuk berbagai tujuan, baik untuk perencanaan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dengan segala konsekuensi negatif yang mengiringinya, mendorong peran besar pemerintah untuk mengambil risiko dan menyeimbangkannya. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan harus memiliki dan mengoptimalkan seluruh sumber daya, kemampuan koneksitas dan kemitraan yang memadai (Reddick & Antonio, 2017).

**b. Kelemahan (*weakness*)**

Kelemahan merupakan faktor internal dalam suatu organisasi yang harus diperbaiki atau diubah menjadi suatu kekuatan bagi organisasi tersebut (Rudy & Prasetya, 2018). Temuan

di lapangan membuktikan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Infrastruktur telekomunikasi menjadi pendukung utama dalam memberikan pelayanan, seperti halnya hasil penelitian Danil dan Rahmadanita yang menyoroti masalah IKD di Kabupaten Sambas (Danil & Rahmadanita, 2024). Berdasarkan hasil wawancara bahwa akses internet di pusat Kota Tidore relatif baik dengan beberapa penyedia layanan yang menawarkan paket internet berbasis *fiber optic* dengan kecepatan hingga 50 Mbps. Namun, di daerah pedesaan terutama di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, masih terdapat tantangan besar terkait akses internet. Di Desa Kususinopa dan Desa Sigela Kecamatan Oba yang terletak di Pulau Halmahera, masyarakat menghadapi kendala serius dalam mengakses internet, karena jaringan internet yang ada sering kali tidak stabil. Desa Sigela meskipun terdapat tower jaringan XL, sinyal yang diterima sangat lemah dan tidak mencukupi kebutuhan komunikasi masyarakat.

2) Ketergantungan pada dokumen fisik.

Beberapa layanan publik dalam proses administrasinya masih bergantung pada dokumen fisik yang memerlukan pengolahan manual, sehingga dapat memperlambat layanan. Banyak layanan publik yang masih mengandalkan dokumen fisik, seperti pada saat verifikasi data penduduk ketika membuka rekening di Bank, pendaftaran sekolah, penerimaan karyawan, dan lain-lain sebagainya.

**c. Peluang (*opportunities*)**

Peluang merupakan faktor eksternal dalam suatu organisasi yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi organisasi jika dimanfaatkan dengan baik. Peluang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman atau tantangan organisasi (Saputri, 2021). Disamping memiliki kelebihan dan kelemahan, Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan memiliki peluang, yaitu:

1) Literasi digital masyarakat.

Literasi digital masyarakat Kota Tidore Kepulauan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat tantangan terkait akses dan pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan utama dalam meningkatkan literasi digital di Kota Tidore Kepulauan adalah keterbatasan akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil. Literasi Digital merupakan gerakan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu

Institusi saja. Semua orang harus terlibat agar tidak tertinggal meliputi Pemerintah/Kominfo, Masyarakat, dan Stakeholder (Isabella et al., 2023).

2) Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan aktivasi IKD, menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pengurusan dokumen kependudukan dan aktivasi IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan (Garini et al., 2021).

3) Kerjasama dengan instansi terkait dan sektor swasta.

Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah, rumah sakit, atau instansi terkait untuk meningkatkan capaian target kinerja. Pemanfaatan data kependudukan menghubungkan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kepentingan dan keperluan akan data kependudukan sehingga membentuk *governance networks* (Rofita, 2022).

4) Inovasi.

Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan telah meluncurkan inovasi berbasis digital, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat dan juga untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Aplikasi DAGA (Dokumen Administrasi Kependudukan Dalam Genggaman Anda) yang memungkinkan masyarakat mengakses dan mencetak dokumen kependudukan secara daring melalui perangkat mobile atau komputer.

**d. Ancaman (*threats*)**

Ancaman merupakan adalah faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian, hambatan, atau tantangan bagi suatu organisasi. Ancaman berasal dari lingkungan luar dan berada di luar kendali langsung, tetapi harus diwaspadai karena bisa mengganggu pencapaian tujuan. Dengan mengenali ancaman, perusahaan dapat mempersiapkan potensi tantangan dan meminimalkan dampaknya (Zainuri & Setiadi, 2023). Adapun ancaman yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut:

1) Kondisi geografis

Secara geografis, Kota Tidore Kepulauan memiliki banyak pulau-pulau, hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, karena membutuhkan biaya untuk transport yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

## 2) Keterbatasan anggaran.

Kendala anggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan juga dialami Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan. Dengan anggaran yang terbatas dapat menghambat peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan khususnya Ketika melakukan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang jauh dari tempat pelayanan.

## 3) Keterbatasan penyediaan blangko KTP-el.

Blangko KTP-el yang disediakan oleh pusat yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terbatas juga merupakan salah satu kendala, sehingga seringkali masyarakat tidak dapat dicetak KTP-el yang merupakan hak penduduk.

Setelah menyusun analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), langkah selanjutnya adalah menyusun strategi atau rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaan program atau layanan. Berikut adalah langkah-langkah yang umum dilakukan setelah analisis SWOT:

### 1. Strategi SO (*Strengths–Opportunities*)

Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal.

Strategi ini dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi inovasi digital (SIAM dan Aplikasi DAGA) dengan memanfaatkan perkembangan literasi digital masyarakat. Misalnya, menyediakan layanan tutorial online atau aplikasi yang ramah pengguna agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan.
- b. Penguatan regulasi dan basis data terintegrasi dengan memperluas kerjasama lintas sektor (sekolah, rumah sakit, toko swalayan, taman bermain, dan swasta lainnya) untuk mendorong masyarakat aktif mengurus dokumen kependudukan.
- c. Kampanye sosialisasi masif melalui media sosial (TikTok, Instagram, Facebook) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekaman KTP-el dan aktivasi IKD, sekaligus menekankan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan sebagai syarat utama pelayanan publik.

### 2. Strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*)

Strategi ini berupaya meminimalkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini dilakukan melalui:

- a. Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dengan memperluas layanan digital Aplikasi DAGA serta sosialisasi manfaat layanan daring sebagai bagian dari program literasi digital masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui program insentif, misalnya pemegang KIA mendapat potongan harga di toko buku, restoran, atau tempat hiburan anak.
- c. Mengajukan dukungan program literasi digital terpadu bersama Kominfo, sekolah, dan komunitas lokal agar masyarakat di wilayah terpencil memahami manfaat layanan digital dan IKD.

### 3. Strategi ST (*Strengths–Threats*)

Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal.

Strategi ini dilakukan melalui:

- a. Mengoptimalkan layanan jemput bola (Si Jola) yang sudah ada untuk menjawab kendala geografis kepulauan dengan menjadwalkan pelayanan rutin di pulau-pulau terluar.
- b. Menggunakan regulasi nasional sebagai dasar advokasi anggaran, sehingga keterbatasan anggaran daerah dapat diatasi melalui dukungan APBN maupun dana transfer pusat.
- c. Mengandalkan sistem keamanan data (ISO 27001) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam layanan daring, sehingga masyarakat dari daerah jauh tidak ragu mengurus dokumen secara online meskipun akses fisik terbatas.

### 4. Strategi WT (*Weaknesses–Threats*)

Strategi ini fokus pada upaya defensif untuk mengurangi kelemahan sekaligus mengantisipasi ancaman. Strategi ini dilakukan melalui:

- a. Membangun kemitraan dengan sektor swasta/CSR untuk mendukung penyediaan sarana prasarana, misalnya pengadaan unit tambahan mobil layanan keliling atau perangkat perekaman KTP-el di desa.
- b. Mendorong digitalisasi dokumen secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, sehingga pelayanan tetap dapat berjalan meskipun ada keterbatasan blangko KTP-el dari pusat.

- c. Mengembangkan strategi pelayanan berbasis kluster kepulauan, sehingga masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Disdukcapil, melainkan dapat dilayani pada titik-titik strategis di wilayah pulau.

Berdasarkan strategi-strategi yang telah disusun, pemetaan strategi terlihat bahwa:

1. Strategi SO fokus pada digitalisasi, sosialisasi masif, dan kerjasama lintas sektor untuk percepatan KTP-el, KIA, dan IKD.
2. Strategi WO fokus pada literasi digital dan insentif partisipasi masyarakat untuk menutup kelemahan layanan manual dan rendahnya kesadaran.
3. Strategi ST fokus pada penguatan jemput bola, advokasi anggaran, dan keamanan data untuk melawan hambatan geografis dan keterbatasan anggaran.
4. Strategi WT fokus pada kemitraan swasta, efisiensi penggunaan dokumen digital, dan model layanan kluster untuk meminimalkan dampak ancaman eksternal.

Strategi-strategi di atas disusun untuk memberikan arah kebijakan yang tepat, terukur, dan realistis sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Pangandaran. Kombinasi antara pemanfaatan kekuatan, perbaikan kelemahan, adaptasi peluang, dan mitigasi ancaman diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian target nasional administrasi kependudukan secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan belum mencapai target nasional di bidang administrasi kependudukan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk perekaman KTP-el, kepemilikan KIA dan penerapan IKD, meskipun telah melakukan berbagai strategi seperti pelayanan jemput bola melalui “Si Jola” dan inovasi digital berbasis aplikasi DAGA. Strategi hasil analisis SWOT yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan capaian target nasional meliputi: (1) Strategi SO dengan fokus pada optimalisasi digitalisasi layanan, sosialisasi masif, dan perluasan kerjasama lintas sektor; (2) Strategi WO melalui peningkatan literasi digital dan pemberian insentif partisipasi masyarakat untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan layanan manual; (3) Strategi ST dengan penguatan pelayanan jemput bola, advokasi anggaran, serta pemanfaatan sertifikasi keamanan data untuk membangun kepercayaan publik; dan (4) Strategi WT dengan membangun kemitraan swasta, mendorong efisiensi dokumen digital, serta pengembangan model pelayanan berbasis kluster kepulauan.

Dengan demikian, strategi yang realistis, aplikatif, dan terukur sangat diperlukan agar Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan mampu meningkatkan capaian target nasional, menjamin hak-hak sipil penduduk, serta menyediakan data kependudukan yang akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Guna evaluasi dan perbaikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menjadikan strategi-strategi yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT sebagai acuan Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dalam menyusun kebijakan.
2. Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan dapat menindaklanjuti strategi SWOT dalam bentuk program nyata, seperti pelayanan klaster kepulauan, insentif kepemilikan dokumen (misalnya potongan harga dengan KIA), atau pengembangan aplikasi DAGA yang lebih adaptif.
3. Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat, namun tetap sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan meningkatkan manfaat dokumen kependudukan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat membantu kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Tesis

- Adiwilaga, R., Mustofa, M. U., & Permana, K. E. (2023). Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2868>
- Anita, D. (2021). Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Desa Lumindai Kota Sawahlunto. *Jurnal IPS*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.489>
- Batubara, Y. E., & Rohmadin, S. (2023). Kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di kabupaten majalengka. *Jurnal Konstituen*, 4(2), 132–144.
- Chermack, T. J., & Kasshanna, B. K. (2007). The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals. *Human Resource Development International*, 10(4), 383–399. <https://doi.org/10.1080/13678860701718760>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.



- Danil, & Rahmadanita, A. (2024). Innovation In Implementing The Digital Population Identity (IKD) Application In The Population And Civil Registration Services Sambas District. *Jurnal Konstituen*, 6(April), 57–75.
- Garini, D. A., Amalia, R., & Ristiani, I. Y. (2021). Efektivitas Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Aplikasi Salaman Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Registratie*, 3(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i1.2360>
- Isabella, I., Iriyani, A., & Puji Lestari, D. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 167–172. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236>
- Rangkuti, F. (2018). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis - Freddy Rangkuti - Google Buku*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reddick, C. G., & Antonio, S. (2017). *Strategi Membangun Pemerintah Digital, Prinsip dan Praktek” atau “Building Digital Government Strategie-Principles and Practices*.
- Rofita, R. R. (2022). Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 26–37. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2285>
- Rudy, & Prasetia, A. M. (2018). SWOT Analysis And Tows Matrix E-Government On Tana Tidung City Of Kalimantan Utara. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/elinvo.v3i1.19518>
- Saputri, O. B. (2021). Analisis SWOT Transformasi Digital Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 17(3).
- Wahkyudin, R. S. (2009). Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dengan Analisis SWOT. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Manajemen STET PBM*, (9), 14.
- Zainuri, R., & Setiadi, P. B. (2023). Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis SWOT Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 12(1).

### **Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan**

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Disdukcapil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6 - 635 Dukcapil Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota